



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.A. Teori Dasar

##### 2.A.1. Manajemen Keuangan

#### A. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengolahan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Manajemen keuangan memiliki peranan penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penting, dengan mempelajari ilmu manajemen keuangan, seseorang akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam pekerjaan dan perkembangan karirnya.

Manajemen keuangan yang baik di sektor publik memerlukan perencanaan yang hati-hati untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan secara efisien. Pemerintah harus merencanakan anggaran dengan cermat, mengendalikan pengeluaran, dan memantau bagaimana uang tersebut dibelanjakan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan memahami pendapatan dan pengeluaran publik, kita bisa lebih mengerti bagaimana pemerintah bekerja dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini juga

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



membantu memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien (Sukoharjo, 2015). Berikut adalah pengertian manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan serta bagaimana mengalokasikan dana tersebut.
- b. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan tentang mengelola keuangan.
- c. Manajemen keuangan dapat pula diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang investasi, pembelanjaan, dan pengelolaan asset-aset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang direncanakan.

## B. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan negara adalah untuk memastikan bahwa sumber daya finansial negara digunakan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Beberapa tujuan spesifik dari pengelolaan keuangan negara antara lain:

a. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi :

Pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Menjamin Kesejahteraan Masyarakat :

Penggunaan dana publik harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, subsidi sosial, dan proyek-proyek pembangunan yang mendukung kualitas hidup rakyat.

c. Mencegah Defisit yang Berlebihan

Salah satu tujuan pengelolaan keuangan negara adalah menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang berlebihan yang bisa menimbulkan beban utang negara.

d. Menghindari Penyalahgunaan dan Pemborosan :

Pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran, korupsi, dan pemborosan, serta memastikan setiap pengeluaran dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

## 2.A.2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

### A. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan dari pengukuran terhadap kinerja keuangan dilakukan guna memastikan beberapa hal. Tujuan pertama yakni guna memberikan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bantuan terhadap purnaikan kinerja pemerintah. Tujuan kedua yakni memberikan gambaran pengalokasian dana dan membuat suatu keputusan. Tujuan terakhir adalah untuk memberikan perwujudan tanggungjawab publis serta melakukan perbaikan terhadap komunikasi kelembagaan yang ada. Kinerja adalah salah satu indikator yang menentukan suatu organisasi itu berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kinerja akan memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan suatu organisasi. Demikian pula dengan kinerja keuangan, yang menjadi suatu indikator dalam bidang keuangan. Adapun tujuan dari mengukur kinerja keuangan yakni (Adolph, 2018):

- a. Memberikan bantuan terhadap pemerintahan untuk lebih fokus terhadap tujuan dari suatu pelaksanaan kegiatan di pemerintahan. Serta memberikan bantuan untuk kefokuskan pelaksanaan program yang mencapai suatu sasaran unit tertentu.
- b. Memberikan gambaran dari pengalokasian sumber dana dan sumber daya yang ada dalam hal pembuatan suatu putusan.
- c. Memberikan perwujudan dari tanggungjawab yang akan memberikan perbaikan terhadap komunikasi yang ada pada kelembagaan untuk mendapatkan hasil yang di inginkan.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa mengukur kinerja keuangan dapat memberikan peranan yang sangat signifikan dalam memberikan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi dari suatu pengelolaan pada strukturasi pemerintahan desa. Mengukur kinerja



keuangan dapat memberikan gambaran terhadap kekuatan serta kelemahan dari suatu kinerja keuangan instansi. Selain itu pengukuran terhadap kinerja keuangan dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja keuangan yang ada dan memberikan pengiraan untuk capaian kinerja keuangan dimasa selanjutnya.

## B. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Manfaat yang di dapatkan dalam mengukur kinerja keuangan yakni dapat menjadi saran informasi terhadap pencapaian suatu kegiatan pekerjaan. Selain itu pengukuran terhadap kinerja kuangan juga mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam menerima informasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itumengukur kinerja keuangan dapat di jadikan sebagai sarana penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kinerja seseorang dalam suatu strukturasi organisasi. (Sihombing A, 2021)

Adapun manfaat dalam mengukur kinerja keuangan terdiri atas lima bagian sebagi berikut :

### a. Mengambil Keputusan

Pengukuran kinerja keuangan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan menganalisis angka-angka keuangan, manajemen dapat mengevaluasi kinerja bisnis mengidentifikasi area yang memerlukan Keuangan membantu meningkatkan akuntabilitas internal perusahaan dengan memiliki *indicator* keuangan yang jelas dan terukur, manajemen dapat memantau pencapaian tujuan keuangan, mengidentifikasi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penyimpanan dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. Hal ini memastikan bahwa setiap bagian organisasi bertanggung jawab atas hasil keuangan mereka dan membantu menciptakan budaya akuntabilitas di dalam perusahaan.

b. Meningkatkan Akuntabilitas Publik

Pengukuran kinerja keuangan juga meningkatkan akuntabilitas publik. Melalui laporan keuangan yang transparan dan terukur, perusahaan memberikan informasi yang diperlukan kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Ini membangun kepercayaan dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan mereka secara jujur dan adil.

c. Perencanaan dan Penetapan Tujuan

Pengukuran kinerja keuangan adalah alat yang penting dalam perencanaan dan penetapan tujuan. Dengan melihat kinerja keuangan masa lalu, perusahaan dapat merumuskan rencana dan tujuan keuangan yang realistis untuk masa depan. Data historis juga membantu dalam mengevaluasi kelayakan proyeksi keuangan dan mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait.

d. Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif

Pengukuran kinerja keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya mereka dengan cara yang lebih efektif. Dengan menganalisis anggaran, biaya, pendapatan, dan rasio keuangan,



manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan efisiensi, mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, dan mengoptimalkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

### 2.A.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan berbagai kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung, penyampaian serta keterbukaan informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Putri et al., 2024)

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah kapasitas dalam mengelola keuangan daerah. Kemampuan pengelolaan keuangan ini sangat menentukan arah perkembangan suatu daerah, karena dapat menjadikannya lebih mandiri, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Pemerintahan Desa diharapkan dapat menjalankan prinsip akuntabilitas yang diperkuat melalui sistem pengawasan serta keseimbangan peran antara Pemerintah Desa dan lembaga desa.



Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan bersama Kepala Desa. Oleh karena itu, BPD sebaiknya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Kepala Desa, mengingat Kepala Desa merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dijatuhkan secara sepihak.

Dalam pengelolaan keuangan desa, kewenangan utama berada pada Kepala Desa yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa sekaligus mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang terpisah. Kepala Desa menjalankan fungsi ini sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa.
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- d) Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- e) Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).
- f) Menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RAK), dan
- g) Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Transparan Merupakan prinsip yang memberikan jaminan akses bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini mencakup kebijakan yang diambil, proses perumusan serta pelaksanaannya, hingga hasil yang telah dicapai.
- b) Akuntabel, Mengandung makna bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja maupun tindakannya kepada masyarakat desa yang memiliki hak untuk meminta penjelasan tersebut.
- c) Partisipatif, Setiap warga desa memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di lingkungannya.
- d) Pengelolaan keuangan desa wajib mengikuti ketentuan, aturan, serta pedoman yang berlaku sehingga pelaksanaannya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

#### 2.A.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah perencanaan tahunan pemerintah desa mengenai penetapan yaitu Kepala Desa dengan suatu Badan Permusyawaratan Desa, hal ini terdapat melalui



dalam adanya pada peraturan desa. sedangkan rencana dalam keuangan pendapatan dan belanja desa merupakan peraturan yang terdapat pada sumber penerimaan dan selain itu pada alokasi pengeluaran desa dalam periode jangka selama 1 tahun (Soraya et al., 2023).

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam kepada Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai pada tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. APBDesa yaitu suatu pengelolaan dalam mengelola aspirasi dan juga kebutuhan dalam masyarakat ataupun mengelola pada program kerja desa dan dengan menyusun adanya rencana pada program kerja tahunan. APBDesa memiliki tiga prinsip yaitu sebagai berikut (Restia, 2019) :

- a. Memfasilitasi yang memacu dalam pembangunan ekonomi produktif contohnya mengenai dalam kegiatan investasi di desa.
- b. Melaksanakan melaksanakan sebuah pembangunan yang secara menyeluruh
- c. Melakukan secara inisiatif terhadap proses kegiatan dalam pembangunan

selain itu terdapat beberapa kelompok yang mengenai pada pendapatan desa yaitu:

1. Pendapatan asli desa



Pendapatan asli desa merupakan penerimaan desa yang terdapat pada hasil kerja sendiri ataupun dari usaha sendiri dalam melakukan suatu pelaksanaan terhadap kewenangan dalam bentuk hasil usaha aset, swadya partisipasi maupun dalam gotong royong. selain itu juga terdapat mengenai Pendapatan asli desa yang diperoleh dari berbagai macam yaitu sebagai berikut :

#### 1. Hasil usaha

Hasil usaha merupakan hasil dalam hasil usaha desa dalam pengelolaannya itu dikelola secara terpisah. Hasil usaha ini memberikan hasil yang menimbulkan adanya penerimaan bagi pendapatan desa dari hasil desa yaitu adanya BUMDesa.

##### a) Hasil aset

Hasil aset yaitu merupakan suatu hasil aset desa yaitu kekayaan yang dapat didapatkan oleh APBDesa mengenai usaha yang dikelola oleh desa terendiri. Swadya, partisipasi, dan gotong royong Hal ini merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat yang mengenai penganggaran penerimaan swadya, partisipasi serta adanya gotong royong yang dihitung secara benar dalam bentuk uang dan dimasukkan ke sebuah rekening kas desa tujuannya untuk mendukung pelaksanaan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

##### b) Transfer Dana desa



Dana desa merupakan suatu pemberdayaan dalam pendapatan dan juga belanja Negara merupakan suatu transfer yang anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan membiayai dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan yang mengenai pelaksanaan pembangunan, pembinaan dalam kemasyarakatan.

c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Terdapat pada Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi adalah suatu sumber mengenai yang dimana mereka dalam sumbernya dari hasil suatu pendapatan desa yang mengenai hasil pajak dan retribusi.

#### 2.A.5. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan desa melibatkan evaluasi dan penilaian terhadap keadaan keuangan desa, termasuk pendapatan, belanja, dan pos-pos keuangan lainnya. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat dianalisis dalam kinerja keuangan desa (Rika Widianita, 2023):

a) Pendapatan Desa :

Analisis pendapatan desa melibatkan penilaian terhadap sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh desa, seperti pajak desa, retribusi, dana desa, atau sumber pendapatan lainnya. Perbandingan antara target pendapatan dan realisasinya dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pengelolaan pendapatan desa.

b) Belanja Desa :



Analisis belanja desa melibatkan penilaian terhadap penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan dan program di desa. Dalam analisis ini, dapat dievaluasi pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, program sosial, dan lainnya. Perbandingan antara alokasi belanja yang direncanakan dan realisasinya dapat membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa.

c) Keseimbangan Keuangan :

Analisis keseimbangan keuangan desa melibatkan penilaian terhadap keseimbangan antara pendapatan dan belanja desa. Evaluasi apakah desa mengalami surplus atau defisit dalam keuangan dapat memberikan gambaran tentang keberlanjutan keuangan dan kemampuan desa dalam mengelola anggaran.

d) Rasio Keuangan :

Analisis rasio keuangan melibatkan penggunaan berbagai indikator keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan desa. Beberapa rasio yang dapat dianalisis termasuk rasio likuiditas, rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi pengeluaran, atau rasio pertumbuhan pendapatan. Rasio-rasio ini membantu dalam menilai stabilitas keuangan desa dan kemampuan dalam mencapai tujuan keuangan.

e) Pertanggungjawaban dan Transparansi :

Analisis kinerja keuangan desa juga melibatkan penilaian terhadap pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Evaluasi apakah laporan keuangan desa disusun dengan baik, dana desa



digunakan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, serta apakah ada pengawasan dan audit yang memadai akan membantu dalam menilai integritas dan akuntabilitas keuangan desa.

Melalui analisis kinerja keuangan desa, pemerintah desa dan pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan keuangan desa, identifikasi area yang memerlukan perhatian, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan

#### 2.A.6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai dalam mengambil keputusan. Adapun karakteristik laporan keuangan menurut (Saleh, 2022) adalah sebagai berikut:

##### 1. Dapat dipahami.

Informasi akan dianggap berkualitas jika informasi tersebut dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Sesuai dengan tujuan laporan keuangan, yaitu di antaranya menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai untuk membuat keputusan investasi maupun kredit.

##### 1. Relevan.

Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau dapat membuat beda hasil dari berbagai



alternatif keputusan yang ada. maka Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Karakteristik informasi yang relevan adalah memiliki nilai umpan balik, prediktif, dan ketepatan waktu.

## 2. Keandalan.

Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya, disajikan dengan cermat, relatif bebas dari kesalahan, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga harus netral (tidak berpihak).

## 3. Dapat dibandingkan.

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Komparabilitas memungkinkan pemakai informasi mengenali persamaan dan perbedaan sesungguhnya dalam peristiwa ekonomi antar perusahaan dengan demikian dapat terbentuk sebuah patokan atau standar yang menjadi acuan.

### 2.A.7. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama



pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.(Iin Ivanda Listari et al., 2022)

Rasio ini menunjukkan persentase pendapatan desa yang berasal dari sumber internal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan desa, semakin mandiri keuangan desa tersebut, karena lebih banyak mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi dan sumber daya lokal.

Rasio kemandirian keuangan desa yang tinggi dapat menjadi indikasi keberhasilan desa dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi lokal. Desa dengan kemandirian keuangan yang baik dapat lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah. Namun, penting untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik desa saat mengevaluasi rasio kemandirian keuangan. Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang berbeda- beda, sehingga tingkat kemandirian keuangan yang ideal dapat bervariasi. Evaluasi rasio ini sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lokal dan perbandingan dengan desa sejenis atau benchmark yang relevan (Dwi, 2021). Berikut rumus untuk menghitung rasio kemandirian desa:

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 2.A.8 Rasio Efektivitas

Efektivitas dapat dipahami sebagai keterkaitan antara hasil yang dicapai (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi lebih menitikberatkan pada aspek input, dan efisiensi berfokus pada output maupun proses, maka efektivitas menekankan pada outcome atau hasil akhir. Dengan demikian, suatu program atau organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi target yang telah direncanakan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai spending wisely (Amu et al., 2023).

Lebih lanjut, efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila tujuan tersebut berhasil dicapai, maka organisasi dianggap telah berjalan secara efektif. Dalam hal ini, efektivitas tidak menilai proses, melainkan hanya melihat sejauh mana tujuan yang direncanakan telah terpenuhi (Amu et al., 2023). Berikut rumus untuk menghitung Efektivitas:

$$\text{RASIO EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Menurut Amu et al. (2023), efektivitas menggambarkan hubungan antara target yang diharapkan dengan hasil aktual yang diperoleh. Tingkat efektivitas dapat diukur melalui rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara



realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil. Suatu pemerintah daerah dinilai efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 atau 100%. Meskipun demikian, semakin tinggi nilai rasio efektivitas yang diperoleh, maka kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan semakin baik.

### 2.A.9. Rasio Efisiensi

Efisiensi pada dasarnya merupakan perbandingan antara output dan input, atau dengan kata lain jumlah output yang dihasilkan per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input minimal, atau sebaliknya dengan input tertentu dapat menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). Ukuran efisiensi diperoleh melalui perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (biaya per output) (Huda, 2022).

Menurut (Huda, 2022), Menurut berbagai ahli, efisiensi dapat diartikan sebagai pencapaian hasil (output) yang optimal dengan sumber daya (input) tertentu, atau penggunaan input yang seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang telah ditargetkan. Dengan demikian, efisiensi menggambarkan rasio input-output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan ukuran rasio yang menilai sejauh mana penggunaan input yang terbatas mampu menghasilkan output yang maksimal. Semakin rendah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, karena hal tersebut menunjukkan adanya penggunaan sumber daya secara optimal. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{RASIO EFISIENSI} = \frac{\text{Biaya yg dikeluarkan untuk PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Indikator efisiensi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara sumber daya yang digunakan oleh suatu unit organisasi (misalnya tenaga kerja, gaji, atau biaya operasional) dengan hasil yang dicapai. Indikator ini memberikan gambaran tentang bagaimana input dikonversi menjadi output atau seberapa efisien proses internal berjalan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efisiensi biasanya diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran yang ditetapkan. Suatu pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio efisiensinya kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio tersebut, maka semakin baik kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan.

### 2.A.11. Rasio Ekonomis

Ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara permintaan dan penawaran terhadap harga input. Secara sederhana, ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu sekaligus seni dalam memperoleh output berupa barang dan jasa dengan kualitas serta kuantitas yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.  
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diharapkan, namun dengan pengeluaran biaya serendah mungkin. Dalam pengukuran tingkat ekonomis, yang menjadi fokus utama adalah masukan (input) yang digunakan, sehingga sifatnya bersifat relatif (Saleh, 2022) berikut adalah rumus Rasio Ekonomis:

$$\text{RASIO EKONOMIS} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai}} \times 100\%$$

Konsep ekonomis dapat dijelaskan sebagai upaya memperoleh input dengan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Tingkat ekonomi diukur melalui perbandingan antara input aktual dengan input yang direncanakan. Dalam konteks kinerja pemerintah daerah, suatu pengelolaan dianggap ekonomis apabila rasio yang dicapai melebihi 100%, artinya jumlah realisasi penerimaan lebih besar daripada anggaran yang telah ditentukan.

## 2.A.12. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan maupun belanja, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi mana yang perlu lebih diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurut (Mahmudi, 2019) rasio pertumbuhan juga berfungsi



untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja anggaran, khususnya dalam pertumbuhan pendapatan, selama beberapa periode tahun anggaran. Semakin tinggi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga serta meningkatkan pencapaian yang telah diraih pada setiap tahun anggaran. Rumus penghitungan rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RASIO PERTUMBUHAN} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

## 2.B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian terdahulu ini yang dijadikan landasan, dan berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuangan Desa yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian                                                                                                  | Variabel Penelitian                                                                                                           | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Iqbal (2019)              | Analisis Kinerja Pemerintah Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 | Analisis rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan. | (1) Tingkat derajat desentralisasi Sangat Kurang, (2) tingkat ketergantungan keuangan desa pada tahun 2017 adalah sangat tinggi dan pada tahun 2018 adalah sangat rendah dan (3) tingkat kemandirian desa rendah sekali. (4) Tingkat efisiensi Pemerintah Desa Muara Kumpeh tahun 2017 |



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Lingsar

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian                                                                                                                     | Variabel Penelitian                                                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | dan 2018 adalah efisien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Larasati (2022)           | Analisis Kinerja Pemerintah Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017-2021            | Analisis rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi belanja, rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan. | (1) Tingkat derajat desentralisasi dikategorikan sangat kurang karena mengalami penurunan pada tahun 2018, (2) tingkat kemandirian keuangan daerah dikategorikan sangat rendah dan termasuk pola hubungan instruktif, (3) tingkat ketergantungan keuangan desanya sangat tinggi sedangkan (4) tingkat efektivitas PADnya sangat efektif dan (5) tingkat efisiensi belanjanya di kategorikan efisien. |
| 3  | Adliyana (2021)           | Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020). | Rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan.                                   | Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Selat berdasarkan (1) tingkat Derajat Desentralisasi dikategorikan sangat kurang, (2) tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi, (3) tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif, dan (4) tingkat Efektivitas PAD dikategorikan tidak efektif.                                   |
| 4  | Maemunah (2020)           | Analisis Rasio Keuangan                                                                                                              | Rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian                                                                                                              | (1) Tingkat derajat desentralisasi fiskal kurang baik tingkat efektivitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
 3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**Universitas Islam Indragiri**

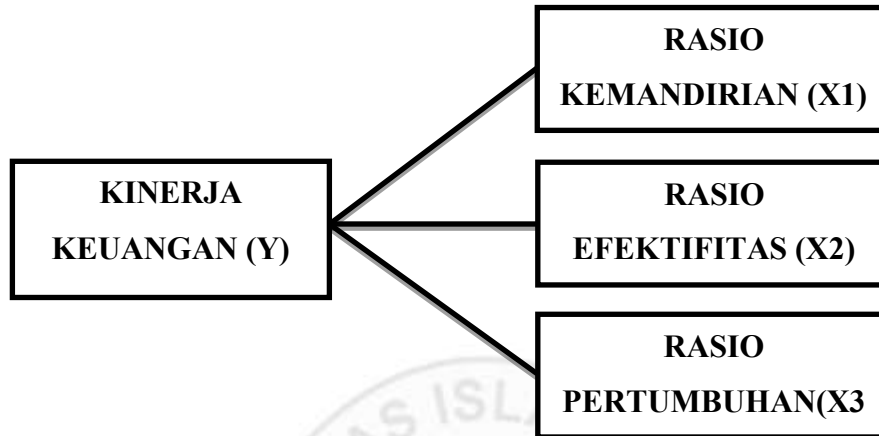
| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian                                                                                                                                                                            | Variabel Penelitian                                                                                                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017-2020). | keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan, rasio keserasian belanja.                | sangat efektif, (2) tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, (3) tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali, (4) tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja menunjukkan trend positif dan trend negatif atau tidak stabil. Pada (5) tingkat keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Brebes masih diprioritaskan untuk belanja operasi sebesar 76,04% sedangkan belanja modal rata-rata sebesar 23.73%. |
| 5  | Marliani (2022)           | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020                                                                                                                      | Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja daerah, | (1) rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultati (2) Rasio derajat desentralisasi termasuk kategori kurang sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kurang (3) rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif (4) rasio efisiensi belanja tergolong sudah efisien                                                                                                      |

Sumber: Data diolah Penulis, 2025



## 2.C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



## 2.D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan telaah pustaka yang ada, maka dapat di buat suatu dugaan sementara yaitu :

1. Di duga kinerja Pemerintah Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri jika diukur menggunakan Rasio Kemandirian berada pada kondisi sehat.
2. Di duga kinerja keuangan Pemerintah Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri jika diukur menggunakan Rasio Efektivitas berada pada kondisi yang Efektif
3. Di duga kinerja keuangan Pemerintah Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri jika diukur menggunakan Rasio Pertumbuhan berada pada kondisi yang baik



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 2.E. Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Moh Nazir, 2005).

**Tabel 2.2**  
**Definisi Variabel Penelitian**

| Variabel    | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rumus                                                                                               | Skala |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Efektifitas | Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. (Iin Ivanda Listari et al., 2022) | $\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli desa} : \text{Pendapatan Transfer}}{100\%}$ | Rasio |
| Efektifitas | Menurut Mahmudi (2016 : 141) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah Desa dalam                                                                                                                                                                                                                | $\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD} : \text{Anggaran PAD}}{100\%}$               | Rasio |



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

|             |                                                                                                                                                                                      |                                                             |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|             | merealisasikan<br>Pendapatan Asli Desa<br>yang direncanakan<br>dibandingkan dengan<br>target yang ditetapkan<br>berdasarkan potensi riil<br>desa.                                    |                                                             |       |
| Pertumbuhan | Rasio pertumbuhan<br>mengukur kemampuan<br>Pemerintah Daerah<br>dalam mempertahankan<br>dan meningkatkan<br>keberhasilan yang telah<br>dicapai dari periode ke<br>periode berikutnya | Rasio Pertumbuhan =<br>$\frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$ | Rasio |

Sumber : Data olahan Peneliti (2025)